

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

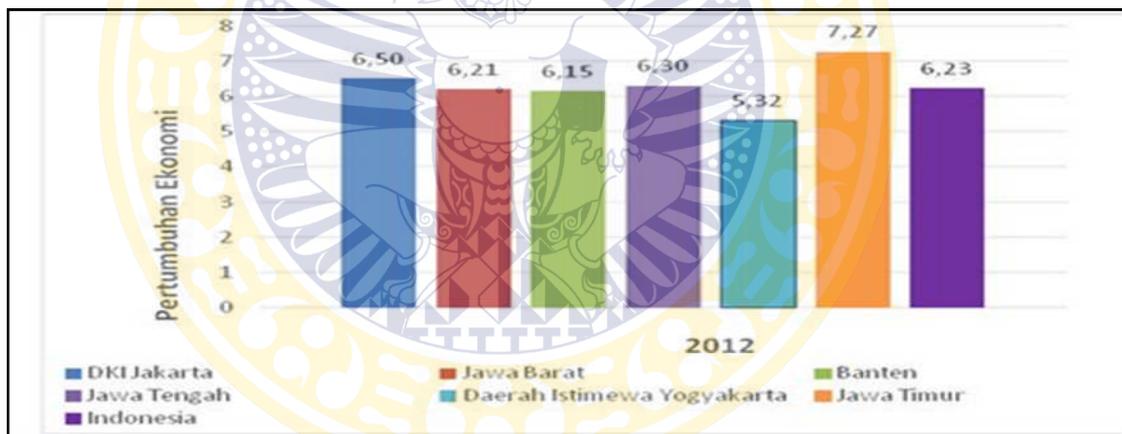
Pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini juga merupakan implementasi dari pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tahun 2004, UU Nomor 22/1999 direvisi dengan UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu pasalnya menjelaskan tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Pemerintahan Daerah yang berimplikasi pada pembangunan daerah ini dirasa sangat penting sehingga undang-undang yang mengatur tentang hal itu (UU 32/2004) mengalami perjalanan panjang dalam perubahan dan perbaikannya. Revisi yang dilakukan terhadap undang-undang tersebut antara lain, (1) Perpu Nomor 3 Tahun 2005, (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, (5)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Menurut Nugroho (2003), kebijakan otonomi daerah dicanangkan agar mendorong Pemerintah Daerah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan antar wilayah sesuai dengan keadaan wilayahnya masing-masing. Demikian juga Provinsi Jawa Timur yang secara terus-menerus memetakan potensi ekonomi dalam memajukan pembangunan wilayah.

Potensi ekonomi utama di Jawa Timur adalah sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Potensi ekonomi yang besar ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat terus bahkan mengalahkan DKI Jakarta.



Sumber: BPS (2013), diolah kembali

Gambar 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Enam Provinsi di Jawa dan Indonesia (%)

Gambar 1.1, memperlihatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta dan nasional. Ini menunjukkan Jawa Timur merupakan

daerah yang potensial dan memiliki banyak keunggulan yang masih mungkin ditingkatkan.

Menurut Sondakh dalam Pranata (2004) dengan otonomi daerah atau desentralisasi diharapkan setidaknya ada delapan faktor positif yang bisa diimplementasikan. Kedelapannya yaitu (1) menanggulangi kemiskinan, (2) membantu masyarakat pedesaan, (3) memudahkan pemungutan pajak, (4) mengurangi pengeluaran pemerintah, (5) memobilisasi sumber-sumber daerah, (6) mengurangi tugas-tugas pemerintah pusat, (7) mengenakan perencanaan dari bawah, (8) mengenakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sayangnya proses desentralisasi belum berkembang secara maksimal. Masih terjadi ketimpangan antara wilayah satu dan lainnya termasuk di Jawa Timur. Hasil penelitian Mardiana (2012) menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang diukur menggunakan Indeks Williamson cenderung menurun. Namun, tingkat ketimpangan masih termasuk dalam ketimpangan taraf tinggi dengan nilai indeks ketimpangan antara 0,52-0,58. Penelitian tersebut dilakukan untuk periode 2001-2010.

Hasil analisis Bappenas tahun 2009-2013 menunjukkan bahwa kabupaten dan kota di Jawa Timur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikelompokkan menjadi empat kuadran. Masing-masing kuadran memiliki penilaian yang berbeda.

Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan produk nasional seperti Produk Domesik

Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota (Susanti, 2000). Tahun 2012, ada lima kabupaten dan kota di Jawa Timur dengan PDRB tertinggi, yaitu: Kota Kediri, Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Pertumbuhan ekonomi kelima daerah tersebut tentu berbeda tergantung dari sumber daya yang dimiliki. Sumber daya inilah yang menjadi modal pembangunan daerah.

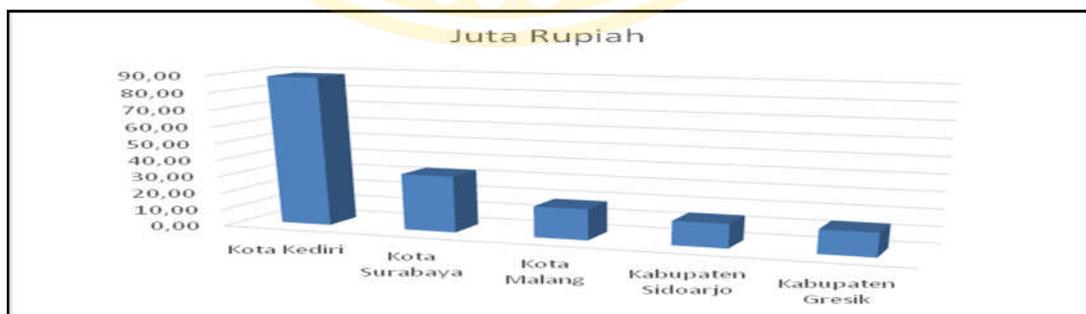
Pembangunan daerah perlu perencanaan untuk menganalisis potensi dan daya saing daerah. Potensi daerah adalah komoditas unggulan yang dimiliki oleh masing-masing daerah termasuk lima kabupaten dan kota seperti tersebut di atas. Menurut Rachman (2003), komoditas unggulan adalah komoditas andalan yang memiliki posisi strategis untuk dikembangkan di suatu wilayah. Posisi strategis ini didasarkan pada pertimbangan teknis (kondisi tanah dan iklim), sosial ekonomi, dan kelembagaan. Pertimbangannya, ketersediaan dan kapabilitas sumberdaya (alam, modal dan manusia) untuk menghasilkan dan memasarkan semua komoditas yang dapat diproduksi di suatu wilayah secara simultan relatif terbatas.

Lingkungan biofisik yaitu lingkungan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Komponen biotik merupakan makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia, sedangkan komponen abiotik terdiri dari benda-benda mati seperti tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Kualitas lingkungan biofisik dapat dikatakan baik jika interaksi antara kedua komponen berlangsung dengan seimbang. Hal ini menegaskan bahwa komoditas unggulan yang dikatakan layak secara biofisik jika

komoditas tersebut diusahakan sesuai dengan kondisi iklim, fisiografi atau bentuk kewilayahan serta kondisi tanahnya. Dikatakan layak secara sosial jika komoditas tersebut memberi peluang berusaha, bisa dilakukan dan diterima oleh masyarakat setempat sehingga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Adapun layak secara ekonomi artinya komoditas tersebut menguntungkan.

Adanya kondisi tiap-tiap daerah yang berbeda menyebabkan strategi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah juga berbeda-beda. Perbedaan tersebut diakibatkan antara lain adanya perbedaan potensi sumber daya dan aktivitas manusia serta pertumbuhan penduduk yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Hal ini pula yang menjadikan suatu daerah berusaha meningkatkan daya saing daerahnya agar tidak tertinggal dari daerah lain.

Semua strategi kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tujuan utamanya tentu untuk pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara mengetahui pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. Berikut ini gambaran dari lima daerah di Jawa Timur dengan nilai PDRB tertinggi pada tahun 2012.



Sumber: BPS Jatim, diolah kembali

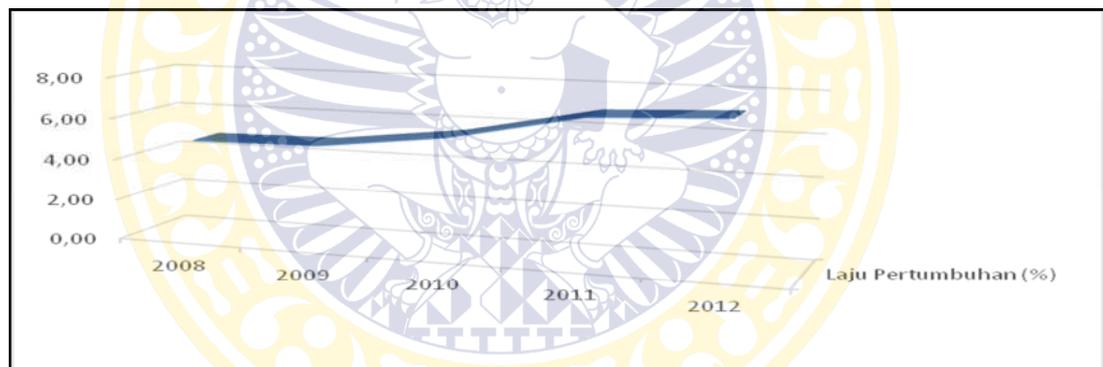
Gambar 1.2
Lima Daerah dengan PDRB Tertinggi di Jawa Timur
Tahun 2012 (Juta Rupiah)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa pendapatan regional masing-masing wilayah berbeda tergantung sumber daya yang dimiliki. Gambar 1.2 juga memperlihatkan bahwa Kota Surabaya dan daerah penyangganya (Kabupaten Sidoarjo dan Gresik) masuk dalam lima daerah dengan PDRB tertinggi di Jawa Timur. Meski demikian, PDRB tertinggi dicapai oleh Kota Kediri. Hal ini terjadi karena Kota Kediri ditopang oleh industri besar yaitu pabrik rokok PT. Gudang Garam yang menyumbang 70-75 persen terhadap PDRB Kota Kediri (Purnama, 2014).

Ibukota Provinsi Jawa Timur yaitu Kota Surabaya memiliki daerah penyangga Gerbangkertosilo (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo dan Lamongan) sebagai *hinterlandnya*. Daerah penyangga menjadi penting karena memiliki interaksi (hubungan) yang sangat intensif dengan Kota Surabaya sebagai *growth centre*-nya. Hal ini terutama jelas dicerminkan dari laju pergerakan penduduk sehari-hari yang tentunya akan bisa berimbas pada perkembangan perekonomian daerah penyangga yang relatif tidak terlalu jauh beda dengan Kota Surabaya.

Dari kelima daerah penyangga tersebut, yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan bersaing dengan Kota Surabaya adalah Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Gambar 1.2 halaman 9 memperlihatkan bahwa kedua kabupaten tersebut masuk dalam lima daerah dengan PDRB tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2012. Oleh karena itu, kedua wilayah tersebut perlu mendapat perhatian serius terutama Kabupaten Sidoarjo.

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu daerah penyangga (*hinterland*) dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yaitu Kota Surabaya, tentunya merupakan daerah yang penting. Ini dalam arti Sidoarjo merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, serta memiliki potensi besar baik dari banyaknya pabrik yang tumbuh di wilayah ini maupun potensi lain yang dimilikinya. Meski pada tahun 2006 silam kabupaten ini sempat terpuruk akibat adanya kasus Lumpur Lapindo yang masih belum terselesaikan hingga saat ini, namun pertumbuhan ekonomi relatif stabil bahkan membaik. Terlihat dari Gambar 1.3 di bawah ini bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo cenderung meningkat tiap tahun.



Sumber: BPS Jatim, diolah kembali

Gambar 1.3

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2008-2012 (%)

Kabupaten Sidoarjo yang terbagi dalam 18 kecamatan ini memiliki laju pertumbuhan ekonomi sekitar 5-7 persen per tahun. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029, membagi wilayah Kabupaten Sidoarjo

dalam beberapa kawasan. Kawasan-kawasan tersebut antara lain kawasan lindung, budidaya, perdesaan, perkotaan, agropolitan, perumahan, cagar budaya, industri, pergudangan dan kawasan militer. Perda tersebut menjelaskan, wilayah yang memiliki prospek pengembangan tinggi terdiri dari Kecamatan Sidoarjo, Waru, Taman, Gedangan, Krian dan Balong Bendo. Adapun yang masuk wilayah tertinggal atau kurang berkembang adalah Kecamatan Jabon dan Prambon.

Masing-masing kecamatan di Sidoarjo rata-rata memiliki daerah unggulan sendiri-sendiri. Kawasan pantai berhutan bakau atau mangrove dapat ditemui di Kecamatan Sedati, Buduran, Sidoarjo dan Jabon. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan untuk lingkungan bangunan non gedung terletak di Kecamatan Tarik, Krian, Wonoayu, Tulangan, Porong, Krembung dan Sedati yaitu berupa candi. Adapun situs purbakala dapat ditemukan di Kecamatan Krian, Tarik, Prambon, Sukodono dan Krembung.

Untuk komoditas pertanian, maka Kabupaten Sidoarjo mengandalkan pada Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Candi, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Tanggulangin dan Kecamatan Porong. Selain itu juga Kecamatan Tulangan, Kecamatan Krembung, Kecamatan Jabon, Kecamatan Krian, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Tarik, Kecamatan Prambon serta Kecamatan Wonoayu. Kabupaten Sidoarjo juga dikenal sebagai kota udang dan bandeng. Kawasan perikanan kabupaten ini tersebar di Kecamatan Waru, Kecamatan Sedati, Kecamatan Buduran, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Candi, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Porong dan Kecamatan Jabon.

Kabupaten Sidoarjo juga memiliki pertambangan minyak dan gas. Bahkan salah satu hasil negatifnya adalah kasus lumpur Lapindo. Kawasan pertambangan di Kabupaten Sidoarjo diarahkan di Kecamatan Porong dan Kecamatan Tanggulangin yaitu pertambangan minyak dan gas bumi. Kabupaten Sidoarjo juga kaya akan industri. Setidaknya ada dua kawasan industri besar di kabupaten ini yaitu Kawasan Industri Berbek di Kecamatan Waru dengan luas 88,49 hektar dan Kawasan Industri Jabon di Kecamatan Jabon seluas 1.116, 64 hektar.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa potensi ekonomi di Kabupaten Sidoarjo tentunya sangat besar. Namun, adanya kejadian lumpur Lapindo sejak tahun 2006 yang belum tertangani dan tertuntaskan sampai saat ini sempat ikut menurunkan roda perekonomian wilayah ini. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Isroifah (2011) menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Sidoarjo mengalami perkembangan setiap tahunnya. Namun setelah terjadi lumpur Lapindo, tingkat pertumbuhannya mengalami penurunan lebih rendah dibandingkan dengan sebelum terjadinya lumpur Lapindo.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo mengalami perkembangan setiap tahunnya, akan tetapi tingkat pertumbuhannya setelah terjadi lumpur lapindo mangalami penurunan dimana tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan sebelum terjadinya lumpur lapindo. Rata-rata perkembangan PAD Kabupaten Sidoarjo yakni 18%. Tingkat Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sidoarjo dimana PDRB sektor primer dari tahun ke tahun mengalami penurunan dimana sebelum dan sesudah terjadi fenomena lumpur lapindo. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penelitian untuk menggali kembali potensi apa saja

yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Sektor apa saja yang bisa dieksplorasi dan dimanfaatkan guna meningkatkan perekonomian Kabupaten Sidoarjo. Ini semua tentu demi memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang tentunya berimbas pada peningkatan taraf kehidupan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Sektor apakah yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Sidoarjo ?
2. Sektor apakah yang memiliki daya saing lokal di Kabupaten Sidoarjo ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah seperti tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis sektor yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk menganalisis sektor yang memiliki daya saing lokal di Kabupaten Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari pembahasan skripsi ini, maka manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut

1. Bagi ilmu pengetahuan, sebagai bahan informasi yang dapat menjadi bahan studi penelitian sejenis secara lebih mendalam dan sebagai perbandingan bagi penelitian di masa-masa mendatang.
2. Bagi penulis, hasil penelitian ini merupakan suatu penerapan terhadap pemahaman teoritis yang telah diperoleh selama masa mengikuti perkuliahan.
3. Bagi pengambil kebijakan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

1.5. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari lima bab dengan sistematika berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini disajikan pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai tujuan yang akan dicapai dan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini serta sistematika skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang mengemukakan teori-teori yang menunjang baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik dari segi teknik maupun ekonomis. Selanjutnya

sebagai bahan perbandingan pada bagian kedua dari bab ini akan ditulis mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk kemudian dijelaskan letak kesamaan dan perbedaaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan peneliti sebelumnya. Pada akhir bab ini berisi tentang hipotesis yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi identifikasi variabel, definisi operasional variabel, dan teknik pengumpulan sampel. Akan dibahas pula dalam bab ini yaitu jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi gambaran umum obyek penelitian dan deskripsi variabel penelitian. Bab ini juga akan berisi tentang pembuktian hipotesis dan pembahasan.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan bagian akhir dari penelitian. Bab ini berisi simpulan hasil penelitian dan dilanjutkan dengan saran berdasar atas simpulan yang diperoleh.